

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arifin, Firdaus, dan Fabian Riza Kurnia. 2019. *Penjabat Kepala Daerah*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. “*Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi*.” *Jurnal Konstitusi*, 4, 3.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Bentham, David dan Kevin Boyle. 2000. *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*. Yogyakarta: Kanisius
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia.
- Fachruddin, I. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni.
- Fuady, Munir. 2010. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Gaffar, Afan. 2006. *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*. Cet. Ke-6. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hakim, Abdul Aziz. 2018. *Impeachment Kepala Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Heywood, Andrew. 2018. *Political Theory: An Introduction 4th. Edition. Terj. Pengantar Teori Politik. E.Setiyawati*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huda, Ni'matul. 2005. *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusamedia.
- 2014. *Ilmu Negara*. Jakarta: Raja Grafindo.
- 2018. *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Ilmar, A. (2014). *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media Grup.

- Ladiqi, Suyatno dan Ismail Suardi Wekke. 2018. *Gambaran Demokrasi: Demografi dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Gawe Buku.
- Latif, A. 2014. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenanda Media Grup.
- Lukman Santoso AZ. 2015. *Hukum Pemerintahan Daerah : Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Marbun, S. F.. 2012. *Hukum Administrasi Negara I*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mahfud MD, Moh. 2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Manan, Bagir. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nurbaningsih, Enny. 2020. *Problematika Pembentukan Peraturan Daerah: Aktualisasi Wewenang Mengatur dalam Era Otonomi Luas*. Jakarta: Rajawali Press.
- Philippus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi rakyat Indonesia; Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Poerbopranoto, Koencoro. 1987. *Sistem Pemerintahan Demokrasi*. Bandung: Eresco.
- Ridwan HR. 2009. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Ridwan, dkk. 2018. *Perluasan Kompetensi Absolut PTUN*. Yogyakarta: Total Media.
- Rishan, Idul. *Hukum dan Politik Ketatanegaraan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2020.
- Sadjijono, H. 2011. *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.

- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, terj. Sahat Simamora, Jakarta: Rineka Cipta
- Shella Marcelina. 2018. “*Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Yogyakarta Dalam Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2017 Di Kota Yogyakarta*,” Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia Press
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Sukanto Satoto. 2004. *Pengaturan dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*. Yogyakarta: Hanggar Kreator.
- Syafrudin, Ateng. 1985. *Pasang Surut Otonomi Daerah*. Jakarta: Bina Cipta.
- Titik Triwulan Tutik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UU 1945*. Jakarta: Gramedia.

B. Jurnal

- Ahmad Marwi, “Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Di Bidang Kepegawaian Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kota Mataram), *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 4, No. 3, 2016.
- Furairhan Kamlar Arnazaye, Arik Nabil Sulaiman, dan Muh Imam Kastholani, “Efektivitas Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah dalam Perspektif Demokrasi dan Teknokrasi”, *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 2023.
- Hafid Irfani & Asri Elies Alamanda, “Prinsip Keterbukaan Dan Akuntabilitas Dalam Pengangkatan Penjabat (PJ) Kepala Daerah”, *Justitiable Universitas Bojonegoro Volume 6 No 2*, 2024.
- Iqbal, M., & Herman, H.. Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Dampaknya terhadap Pembangunan Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir. *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 4(1), 1–13, 2018.
- Juanda & Ogiandhafiz Juanda, “Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Menghadapi Pilkada Serentak 2024 dalam Perspektif Hukum Tata

Negara”, *Jurnal Keamanan Nasional Volume VIII*, Nomor. 1, Juli 2022.

Mazdan Maftukha Assyayuti, “Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah Perspektif Demokrasi Konstitusional”, *LEX Renaissance No. 2 Vol. 7*, April 2022.

Mulyanti, Dewi, “Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah Melalui Judicial Review Dan Executive Review”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol. 5, Maret 2017.

RA. Agus Abikusna, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, *Jurnal SOSFILKOM, Volume XIII* Nomor 01 Januari-Juni 2019, FISIP UMC, 2019..

Situngkir, D. A. (2023). Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan dalam Ilmu Hukum. *Ensiklopedia of Journal*, 5(4), 1 Juli 2023.

Sukamto Satoto dan Bahder Johan Nasution, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, LPPM Universitas Jambi, *Jurnal Sains Sosio Huaniora* P-ISSN: 2580-1244 Volume 3 Nomor 1 Juni 2019.

Suwarno, A, "Penerapan Otonomi Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Administrasi Negara*, 15(2), 2021.

C. Artikel Internet

<https://www.kompas.tv/article/285718/politikus-ppp-putusan-mk-soal-penunjukanpenjabat-kepala-daerah-harus-dipatuhi-pemerintah>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/12/09312991/dilantik-lima-penjabat-gubernur-resmibertugas>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/otonomi%20daerah>

<https://www.bkn.go.id/terdapat-214-kekosongan-jabatan-kepala-daerah-pengangkatan-sampai-pemberhentian-pegawai-harus-kantongi-pertek-kepala-bkn/>

<https://news.detik.com/berita/d-6074819/ini-daftar-101-kepala-daerah-yang-akhiri-jabatan-di-2022>

<https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/c6de1c3e44dee06/ada-170-kepala-daerah-yang-masa-jabatannya-habis-pada-2023>

<https://news.detik.com/berita/d-6074819/ini-daftar-101-kepala-daerah-yang-akhirijabatan-di-2022>

<https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/c6de1c3e44dee06/ada-170-kepala-daerah-yang-masa-jabatannya-habis-pada-2023>

https://id.wikipedia.org/wiki/Pelantikan_penjabat_kepala_daerah_serentak_di_Indonesia_2022

https://id.wikipedia.org/wiki/Pelantikan_penjabat_kepala_daerah_serentak_di_Indonesia_2023

D. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

-----*Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*. UU Nomor 23 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

-----*Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang*. UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898.

-----*Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan*. UU Nomor 30 Tahun 2014

-----*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pemilihan , Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah*. Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

-----*Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota*. Permendagri Nomor 1 Tahun 2018.

-----*Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Bupati/Wali Kota*. Permendagri Nomor 4 Tahun 2023.

-----Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

-----Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 67/PUU-XIX/2021.

----- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XX/2022.

E. Karya Ilmiah

Dadan Ramdani, “Problematika Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024”, (Tesis, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2022)

Vinod, Mehra, “Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah Oleh Perwira Tinggi Polri Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, (Tesis, Jambi, Universitas Jambi, 2021)